

perpus

WYDA: 35000

Katalog BPS : 2205.35

Laporan Eksekutif
LINGKUNGAN HIDUP
DI PROPINSI JAWA TIMUR
HASIL PODES 2005



www.bps.go.id
www.bps.jatim.go.id

09
ap
nd.
an Pusat Statistik

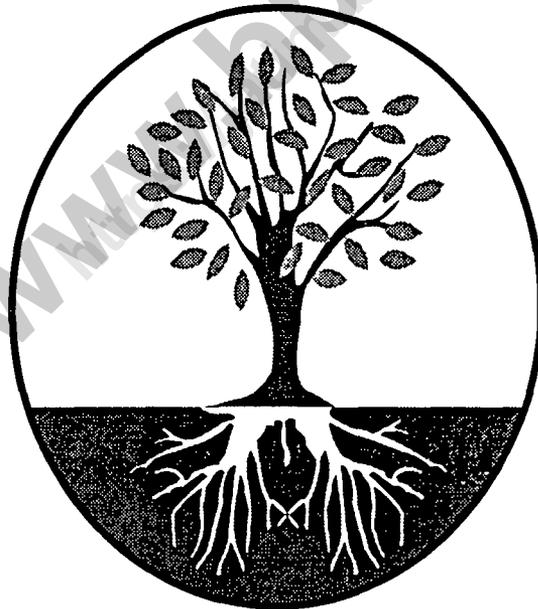
BPS BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Laporan Eksekutif

LINGKUNGAN HIDUP

DI PROPINSI JAWA TIMUR

HASIL PODES 2005



Laporan Eksekutif

LINGKUNGAN HIDUP

DI PROPINSI JAWA TIMUR

HASIL PODES

Nomor Publikasi 35523 0601

Katalog BPS 2205 35

Naskah

Mohammad Imron, S Si

Editor

Hera Hendra Permana, MA

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Laporan Eksekutif Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Propinsi Jawa Timur ini, merupakan laporan ringkas hasil Podes 2005 yang khusus menyajikan kondisi lingkungan hidup diberbagai desa yang ada di propinsi Jawa Timur, seperti tempat pembuangan sampah, tempat buang air besar, sumber air minum, lokasi permukiman kumuh, gangguan pencemaran serta bencana alam

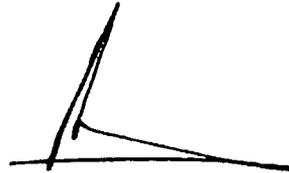
Laporan Eksekutif ini hanya menyajikan hal-hal pokok saja, dengan harapan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi pengguna data khususnya para eksekutif/legislatif yang waktunya sangat terbatas untuk mengkaji data yang bersifat rinci

Bagi para pengguna data yang memerlukan data rinci, hasil Podes 2005 juga diterbitkan dalam bentuk publikasi yang berjudul "**Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Timur 2005**" Publikasi dimaksud memuat secara lengkap Karakteristik desa di Propinsi Jawa Timur berdasarkan hasil Podes 2005, dirinci menurut Kabupaten/Kota

Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya. Semoga penulisan ini bermanfaat

Surabaya, Juni 2006

KEPALA BPS PROPINSI JAWA TIMUR,



DJAMAL, SE, M Sc

NIP 340004373

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1 PENDAHULUAN	
1 1 Latar Belakang	1
1 2 Tujuan Penulisan	2
1 3 Metodologi	2
2 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	
2 1 Kawasan Bantaran Sungai	3
2 2 Kawasan Di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Ekstra Tinggi	4
2 3 Permukiman Kumuh	5
3 PERILAKU MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN	
3 1 Tempat Membuang Sampah	6
3 2 Tempat Buang Air Besar	7
3 3 Sumber Air Minum	8
4 INDUSTRI - PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN	
4 1 Industri Besar dan Sedang	10
4 2 Industri Kecil	11
4 3 Pertambangan/Penggalan Golongan C	12
5 PENCEMARAN, WABAH PENYAKIT DAN BENCANA ALAM	
4 1 Pencemaran Lingkungan	14
4 2 Wabah Penyakit	15
4 3 Bencana Alam	15
6 PENUTUP	18

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah, data yang berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu wilayah sangat dibutuhkan. Di tingkat wilayah administrasi rendah misalnya, informasi tentang kondisi lingkungan suatu daerah dapat berperan bagi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan suatu daerah secara lebih komprehensif agar pembangunan yang dilaksanakan nantinya tepat sasaran dan lebih berwawasan lingkungan.

1.1. Latar Belakang

Masalah lingkungan di Jawa Timur telah menjadi permasalahan yang cukup kompleks, sangat mendesak untuk segera ditangani serta cukup rumit untuk dihadapi. Ibaratnya, masalah lingkungan tidak bisa selesai dengan hanya cukup dengan menerapkan skala prioritas suatu bidang tertentu saja. Hal ini disebabkan permasalahan lingkungan melibatkan semua aspek yang ada. Sehingga untuk menyelesaikannya hingga tuntas dibutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di dalamnya.

Oleh karena itu berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini haruslah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nantinya selain diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga harus tetap memperhatikan pelestarian dan kesehatan lingkungan sekitarnya tanpa mengakibatkan kerugian pada masyarakat itu sendiri.

Data Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya sumber data yang lebih menekankan pada penggambaran situasi wilayah (regional), yang mencakup berbagai variabel diantaranya mengenai lingkungan hidup. Dengan sajian hasil Podes ini diharapkan dapat menjadi masukan agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan

Laporan eksekutif ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi lingkungan hidup wilayah desa di propinsi Jawa Timur pada tahun 2005 secara cepat dan mudah bagi pengguna data, khususnya para eksekutif/legislatif yang waktunya sangat terbatas

1.3. Metodologi

Pencacahan Podes ini dilakukan terhadap seluruh desa/kelurahan di Indonesia Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait

Pengumpulan data Podes dilakukan dengan cara sensus (*complete enumeration*) Pencacahan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terhadap Kepala Desa/ Lurah, staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan luas wilayah suatu daerah yang relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, akan mengakibatkan terasa semakin sempitnya ruang gerak bagi makhluk hidup khususnya manusia. Hal ini tentunya lebih dapat dirasakan di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduknya. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang matang guna penataan suatu wilayah, khususnya penataan daerah permukiman agar nantinya masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman.

Beberapa kawasan seringkali dijadikan sebagai daerah permukiman penduduk walaupun sebenarnya kurang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain kurang memenuhi syarat kesehatan, untuk kawasan tertentu juga relatif berbahaya bagi keselamatan jiwa seseorang. Oleh karena itu, sudah seyakinya kawasan tersebut tidak digunakan sebagai daerah permukiman penduduk.

2.1. Kawasan Bantaran Sungai

Bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No 35 Tahun 1991 tentang sungai). Bantaran sungai sebenarnya merupakan area yang disediakan guna menampung air sungai bila sewaktu-waktu terjadi penambahan debit air. Jadi sangat membahayakan apabila kawasan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.

Dari 8.477 desa yang ada di Jawa Timur, bersumber data Podes 2005 sekitar 10,69 persen diantaranya memiliki permukiman di kawasan bantaran sungai. Sedangkan sebanyak 70,40 persen tidak mempunyai kawasan permukiman di bantaran sungai, dan sisanya sebanyak 18,91 persen tidak ada sungai yang melintas di wilayah desa tersebut. Ini tentunya perlu mendapat perhatian, mengingat selain kawasan bantaran sungai rawan terjadi bencana banjir, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut juga lebih rentan terhadap wabah penyakit.

Tabel 1.1
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Bantaran Sungai</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Malang	31	54,39
Kota Pasuruan	11	32,35
Kota Surabaya	48	29,45
Kab Banyuwangi	61	28,11
Kab Situbondo	34	25,00

Dari data tersebut diketahui pula bahwa Kota Malang merupakan Kab/Kota yang secara relatif terbanyak mempunyai desa dengan permukiman di kawasan bantaran sungai. Dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur, hanya dua daerah yang tidak mempunyai permukiman penduduk di kawasan bantaran sungai yakni Kab Magetan dan Kota Probolinggo.

2.2. Kawasan Di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Ekstra Tinggi

Jaringan listrik tegangan tinggi lazim dikenal orang dengan sebutan SUTET (Saluran Listrik Tegangan Ekstra Tinggi) biasa dialiri tegangan listrik di atas 500 KV. Warga masyarakat seringkali menjadikan kawasan di bawah jaringan tersebut sebagai tempat tinggal, walaupun sebenarnya kurang layak.

Tabel 1 2
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Bawah SUTET

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Bawah SUTET</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Malang	15	26,32
Kab Probolinggo	80	24,24
Kota Blitar	4	20,00
Kab Pasuruan	68	18,63
Kota Madiun	5	18,52

Sebagian besar desa-desa di Jawa Timur memang tidak dilewati oleh SUTET. Namun sebanyak 7,74 persen desa di Jawa Timur ternyata ada sebagian warganya yang tinggal di bawah jaringan SUTET. Kota Pasuruan merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur dimana tidak ada penduduknya yang tinggal di kawasan tersebut.

2.3. Permukiman Kumuh

Daerah perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih tinggi, menuntut sebagian masyarakat untuk tinggal berhimpitan di suatu lokasi. Tingkat kepadatan yang tinggi tersebut masih ditambah lagi dengan kualitas rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni dan saluran pembuangan limbah yang seringkali macet, menjadikan suatu lingkungan permukiman menjadi kumuh serta jauh dari ideal untuk dijadikan tempat tinggal.

Tabel 1.3
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Kumuh

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Kumuh	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Surabaya	55	33,74
Kota Malang	19	33,33
Kota Pasuruan	11	32,35
Kota Kediri	13	28,26
Kota Madiun	6	22,22

Kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, pusat pemerintahan dan segala aktivitas masyarakat Jawa Timur, yang didukung berbagai sarana & prasarana, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Hingga tidak mengherankan apabila Kota Surabaya menempati urutan teratas secara relatif terbanyak permukiman di kawasan kumuhnya. Sekitar 33,74 persen kelurahan di Kota Surabaya memiliki permukiman kumuh. Tentunya ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri bagi pemerintah, khususnya pihak Pemerintah Kota Surabaya.

PERILAKU MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Permasalahan bagi lingkungan pada suatu wilayah tidak hanya kepadatan penduduk saja. Selain itu masih banyak permasalahan lain, dari permasalahan penyediaan struktur dan infra struktur bagi masyarakat, hingga masalah pengelolaan lingkungan yang tentunya tidak bisa lepas dari perilaku masyarakatnya itu sendiri.

Beberapa perilaku masyarakat ditengarai menjadi pemicu perubahan kualitas lingkungan suatu wilayah. Perilaku tersebut antara lain tercermin dari tempat membuang sampah, tempat buang air besar dan sumber air minum yang digunakan. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat yang diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dapat terus terjaga.

3.1. Tempat Membuang Sampah

Sampah rumah tangga apabila tidak ditangani secara serius, semakin lama akan menimbulkan permasalahan yang serius pula. Sampah selayaknya dibuang dalam kotak sampah untuk kemudian diangkut dan selanjutnya didaur ulang. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih dengan seenaknya sendiri membuang sampah di sungai atau tempat lainnya. Selain tidak baik ditinjau dari sisi kesehatan, hal ini juga dapat menimbulkan bahaya yang lain, misalnya banjir.

Berdasarkan data Podes 2005 diketahui bahwa baru 9,56 persen desa di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya membuang sampah di tempat sampah untuk kemudian diangkut (kode 1). Sebagian besar desa di Jawa Timur penduduknya cenderung membuang sampah dalam lubang/dibakar (kode 2), dimana tercatat sebanyak 81,41 persen desa yang penduduknya berperilaku seperti itu. Sedangkan yang membuang di sungai (kode 3) dan tempat lainnya (kode 4) masih relatif kecil.



Kota Surabaya menempati urutan teratas persentase desa sadar sampah di Jawa Timur Artinya penduduk Kota Surabaya sebagian besar telah membuang sampah di tempat sampah untuk kemudian diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA) Pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang cukup baik tersebut kiranya patut dicontoh oleh Kab/Kota lain di Jawa Timur

Tabel 2 1
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang sadar sampah

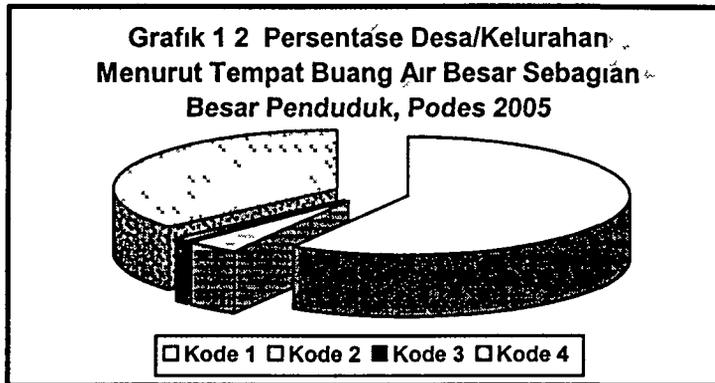
Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang sadar sampah	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Surabaya	148	90,80
Kota Malang	50	87,72
Kota Madiun	20	74,07
Kab Kediri	34	73,91
Kab Mojokerto	12	66,67

3.2. Tempat Buang Air Besar

Salah satu perilaku masyarakat yang dapat dijadikan sebagai indikator kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan adalah kepemilikan fasilitas tempat buang air besar Peningkatan persentase masyarakat yang telah mempunyai jamban pribadi mengindikasikan adanya peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan lingkungannya

Di Jawa Timur dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kepedulian masyarakat tersebut Ini tercermin dari peningkatan jumlah desa yang sebagian besar masyarakatnya telah menggunakan jamban pribadi Hasil Podes 2000 mencatat sebanyak 4 040 desa yang masuk kategori tersebut, yang kemudian meningkat menjadi

4 638 desa berdasarkan Podes 2003 Dan dari hasil Podes 2005 diketahui bahwa jumlah desa yang sebagian warganya memiliki jamban pribadi telah mencapai 4 970 desa



Apabila kita lihat persentasenya, desa-desa di Jawa Timur yang sebagian besar warganya telah memiliki jamban sendiri (kode 1) mencapai 58,63 persen. Namun yang masih cukup memprihatinkan adalah masih cukup besarnya persentase desa yang sebagian besar penduduknya menggunakan selain jamban untuk tempat buang air besar (kode 4), yakni sebesar 36,40 persen. Tiga daerah di Jawa Timur yakni Kota Blitar, Kota Madiun dan Kota Surabaya, tercatat sebagai daerah yang seluruh desanya mayoritas penduduknya memiliki jamban pribadi.

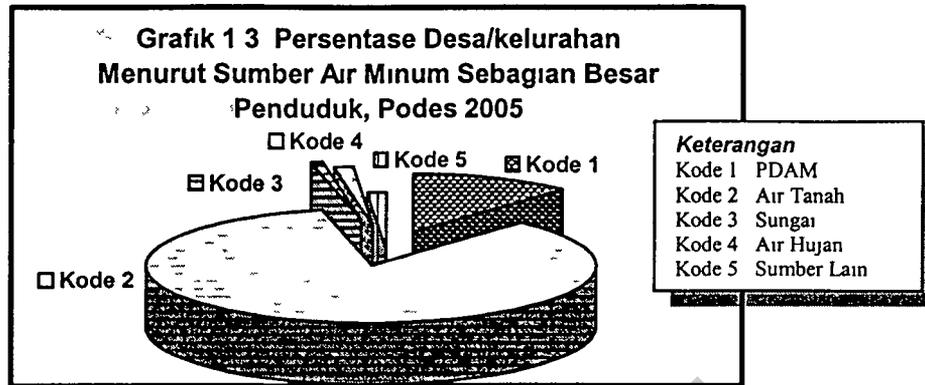
Tabel 2.2
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang punya jamban sendiri

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang punya jamban sendiri	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Blitar	20	100,00
Kota Madiun	27	100,00
Kota Surabaya	163	100,00
Kota Kediri	45	97,83
Kota Batu	22	95,65

3.3. Sumber Air Minum

Perilaku penduduk dalam penggunaan sumber air minum sedikit banyak juga berpengaruh terhadap lingkungan. Penggunaan sumber air minum yang berasal dari air tanah, tentunya berdampak pada persediaan air tanah itu sendiri. Semakin tipisnya tingkat persediaan air tanah akan berakibat semakin menurunnya permukaan air tanah, yang tentunya berujung pada terjadinya intrusi air laut yang semakin masuk ke dalam

daratan Sumber air minum yang dicakup disini adalah sumber air untuk keperluan minum/masak serta mandi/cuci sebagian besar penduduk



Mayoritas penduduk Jawa Timur masih menjadikan air tanah sebagai pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan airnya Hal tersebut tercermin dari hasil Podes 2005 yang menunjukkan sebanyak 84,74 persen desa di Jawa Timur sebagian besar masyarakatnya menggunakan air tanah (kode 2) dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan desa yang mayoritas penduduknya telah menikmati fasilitas PDAM baru mencapai 11,75 persen saja Sedangkan yang memanfaatkan sungai (kode 3), air hujan (kode 4) dan sumber lainnya (kode 5) sebagai sumber air tidak ada yang lebih dari 2 persen

Tabel 2 3
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang menggunakan air tanah

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang menggunakan air tanah	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab Trenggalek	157	100,00
Kota Blitar	20	100,00
Kab Kediri	339	98,55
Kab Situbondo	133	97,79
Kab Jember	241	97,56

Tingginya pemanfaatan air tanah di Jawa Timur tentunya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Apabila hal ini diabaikan, dapat menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari Hal sama juga dapat terjadi pada kab/kota di Jawa Timur Kab Trenggalek dan Kota Blitar tercatat sebagai daerah yang semua desanya menggunakan air tanah sebagai sumber air

INDUSTRI – PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan. Sektor industri dan pertambangan merupakan dua sektor yang diandalkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri (besar, sedang dan kecil) maupun usaha penambangan/ penggalian golongan C sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sekitar, serta merangsang timbulnya sektor informal yang ujungnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, kedua sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun disisi lain, sektor industri dan pertambangan seringkali juga disebut-sebut sebagai biang keladi terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Kedua sektor ini apabila tidak ditangani dan ditata secara serius memang rentan untuk dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan kedua sektor tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan perubahan kualitas lingkungan melalui limbah yang dihasilkan dalam proses produksinya. Sehingga yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana caranya agar kedua sektor tersebut dapat memberikan kontribusi pada pembangunan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungan melalui penataan dan pengawasan yang lebih optimal.

4.1. Industri Besar dan Sedang

Industri adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang setengah jadi/jadi, dari kurang nilainya menjadi barang lebih tinggi nilainya. Industri biasa dikelompokkan dalam 3 kategori yakni besar, sedang dan kecil berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Keberadaan industri besar dan sedang di suatu daerah seringkali dianggap sebagai faktor pemicu terjadi pergeseran kualitas lingkungan melalui limbah

yang dihasilkan Daerah yang memiliki industri cenderung lebih rawan mengalami pencemaran lingkungan dibanding yang tidak memiliki Oleh sebab itu, keberadaan keduanya perlu dibrangi dengan sarana pengolahan limbah yang memadai

Tabel 3.1
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa yang ada Industri Besar dan Sedang di Wilayahnya

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang ada Industri Besar-Sedang di Wilayahnya</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Malang	45	78,95
Kota Madiun	18	66,67
Kota Pasuruan	22	64,71
Kota Mojokerto	11	61,11
Kota Surabaya	98	60,12

Dari sebanyak 8 477 desa di Jawa Timur, 1 853 desa diantaranya memiliki industri besar dan sedang di wilayahnya Bila dilihat penyebarannya, mayoritas industri tersebut berada di wilayah perkotaan Ini terlihat dari lima besar urutan kabupaten/kota yang desanya ada industri besar dan sedang, semuanya diduduki oleh daerah yang tergolong perkotaan Kota Malang menduduki urutan teratas dengan persentase desa yang memiliki industri besar dan sedang mencapai 78,95 persen

4.2. Industri Kecil

Industri kecil merupakan jenis industri yang paling memasyarakat dibanding dengan jenis industri yang lain Sebab, selain memerlukan modal yang relatif sedikit, tidak memerlukan lahan yang luas, industri kecil biasanya cenderung padat karya

Yang kerap menjadi permasalahan adalah industri kecil seringkali tidak dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah Walaupun limbah yang dihasilkan relatif lebih sedikit dibanding jenis industri besar dan sedang, namun hal tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat limbah yang dihasilkan juga dapat mencemari lingkungan sekitarnya

Tabel 3 2
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa yang ada Industri Kecil di Wilayahnya

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang ada Industri Kecil di Wilayahnya</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Probolinggo	29	100,00
Kota Madiun	27	100,00
Kab Trenggalek	154	98,08
Kota Pasuruan	33	97,05
Kab Banyuwangi	209	96,31

Data Podes mencatat industri kecil tersebar di 6 939 desa di Jawa Timur atau sekitar 81,86 persen dari desa yang ada Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil di Jawa Timur keberadaannya telah merambah hampir ke semua desa Kota Probolinggo dan Kota Madiun tercatat sebagai dua daerah yang semua desanya memiliki industri kecil di wilayahnya

4.3. Pertambangan/Penggalian Golongan C

Penggalian Golongan C adalah kegiatan di bidang pertambangan dan penggalian, seperti batu/koral, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya seperti batu koral, aspal, gips dan gamping Tidak kalah dengan industri, keberadaan usaha pertambangan/penggalian yang juga kerap menimbulkan pergeseran kualitas lingkungan Hal ini dapat terjadi bila eksploitasi yang dilakukan tidak memperhatikan faktor keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitarnya

Tabel 3.3
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa yang ada Usaha Penambangan/Penggalian di Wilayahnya

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang ada Penambangan/Penggalian di Wilayahnya</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab Trenggalek	90	57,32
Kab Sumenep	169	51,06
Kab Pacitan	83	50,61
Kab Blitar	123	49,60
Kab Situbondo	61	44,85

Berdasarkan data Podes tahun 2005 dari total desa/kelurahan di Jawa Timur sebanyak 8 477, sekitar 25,72 persen diantaranya terdapat lokasi usaha penambangan/penggalian golongan C Kab Trenggalek merupakan yang tertinggi persentasenya, tercatat 57,32 persen atau sebanyak 90 desa/kelurahan yang mempunyai lokasi usaha penambangan/penggalian golongan C Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut juga diperlukan pengoperasian sarana pengolah limbah yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya gangguan kesehatan masyarakat sekitar akibat adanya kegiatan usaha tersebut

www.bps.go.id

BAB
5

PENCEMARAN, WABAH PENYAKIT, DAN BENCANA ALAM

Perubahan kualitas lingkungan hidup bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran, wabah penyakit dan bencana alam merupakan sebagian dampak yang dapat timbul dari terjadinya kerusakan lingkungan yang kerap dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat.

5.1. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan di suatu daerah biasa ditandai dengan adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan. Pencemaran yang terjadi dapat berupa pencemaran air, udara, tanah maupun suara.

Tabel 4.1
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa yang mengalami Pencemaran (Air/Udara/Tanah/Suara)

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mengalami Pencemaran (Air/Udara/Tanah/Suara)	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Mojokerto	9	50,00
Kota Malang	26	45,61
Kab Sidoarjo	109	30,88
Kab Blitar	73	29,44
Kota Pasuruan	9	26,47

Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur tercatat sebagian desanya terjadi pencemaran lingkungan. Kota Mojokerto, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo merupakan tiga daerah yang tertinggi persentase desanya yang mengalami pencemaran lingkungan. Apabila kita telaah lebih dalam, ternyata hal tersebut dapat saja terjadi

mengingat di ketiga daerah tersebut banyak terdapat industri, baik itu yang berskala besar, sedang maupun kecil

5.2. Wabah Penyakit

Wabah penyakit adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota masyarakat Jenis Wabah yang diamati secara umum adalah muntaber, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), campak dan malaria

Tabel 4.2
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa yang mengalami Wabah Penyakit Periode 2004 - 2005

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mengalami Wabah Penyakit Periode 2004 - 2005	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab Pacitan	82	50,00
Kota Surabaya	75	46,01
Kota Kediri	21	45,65
Kota Batu	9	39,13
Kota Mojokerto	7	38,89

Dari data Podes 2005 diketahui beberapa daerah di Jawa Timur mengalami wabah penyakit selama setahun terakhir Kabupaten Pacitan merupakan yang terbesar persentasenya dengan 50 persen dari 164 desa yang ada terjadi wabah penyakit Secara agregat di Jawa Timur sebanyak 1 825 desa yang mengalami wabah penyakit selama setahun terakhir

5.3. Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan, kerugian, kesengsaraan dan penderitaan penduduk Bencana alam merupakan suatu yang tidak dapat ditolak, namun dapat diminimalkan risikonya Beberapa bencana alam yang terjadi sebenarnya juga tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri Penebangan hutan yang tidak terkendali beresiko menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor

Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam di beberapa daerah di Indonesia Bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi di NTT, serta angin puyuh dan banjir yang terjadi di beberapa daerah Yang baru-baru ini terjadi adalah bencana gempa bumi di DI Yogyakarta dan sekitarnya yang telah menelan

korban jiwa hingga di atas 5 000 jiwa Gempa bumi tersebut juga dirasakan di beberapa daerah di Jawa Timur Bahkan di Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan sekitar beberapa bangunan/rumah juga roboh walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa

Tabel 4 3
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mengalami Bencana Alam dalam Periode 2002 - 2005

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang mengalami Bencana Alam Periode 2002 - 2005</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab Trenggalek	105	66,88
Kab Pacitan	92	56,10
Kota Mojokerto	10	55,56
Kota Batu	11	47,83
Kab Blitar	114	45,97

Di Jawa Timur sendiri selama periode 2002 – 2005 tercatat sebanyak 2 148 desa/kelurahan yang mengalami bencana alam, baik itu berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puyuh ataupun yang lain Kabupaten Trenggalek merupakan yang terbesar persentase desanya yang mengalami bencana alam selama tiga tahun terakhir Sebanyak 105 desa/kelurahan (66,88 persen dari jumlah desa/kelurahan) di sana yang mengalami bencana alam Kota Blitar merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang luput dari bencana alam, dimana tidak satupun desa/kelurahan di Kota Blitar yang mengalami bencana alam selama periode 2002 - 2005

Tabel 4 4
Urutan 5 besar kab/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang Rawan Bencana

Kab/Kota	<i>Banyak desa/kelurahan yang Rawan Bencana</i>	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab Trenggalek	95	60,51
Kab Pacitan	88	53,66
Kota Pasuruan	16	47,06
Kab Situbondo	52	38,24
Kota Malang	20	35,09

Mengingat bencana alam tidak dapat dihindari tetapi hanya dapat diminimalkan risikonya, maka sudah selayaknya bagi daerah-daerah yang rawan bencana untuk dapat lebih mewaspadaai terjadinya bencana alam tersebut. Beberapa daerah di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan tergolong rawan bencana. Untuk daerah yang tergolong rawan bencana selayaknya menyiapkan tim penanggulangan bencana yang dapat diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Sedangkan untuk daerah yang tergolong tidak rawan bencana diharapkan tidak lengah dan tetap selalu waspada, mengingat bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

www.bps.go.id

BAB
6

PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur masih cukup baik. Namun demikian beberapa hal masih perlu dilakukan guna mempertahankan kondisi yang sudah baik tersebut. Berbagai usaha yang dilakukan tersebut hendaknya dapat melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah melalui instansi terkait maupun masyarakat.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian khususnya pemerintah Propinsi Jawa Timur antara lain

1. Masih cukup banyak masyarakat yang tinggal di kawasan marginal, khususnya daerah bantaran sungai, di bawah jaringan listrik tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan kawasan kumuh.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilakunya sehari-hari, khususnya perilaku membuang sampah dan penggunaan jamban pribadi.
3. Tingginya tingkat pemakaian air tanah di Jawa Timur perlu mendapat perhatian lebih, mengingat cadangan air tanah semakin lama semakin menipis.
4. Cukup besarnya jumlah industri (besar, sedang dan kecil) dan usaha penambangan/penggalian golongan C yang beraktifitas di Jawa Timur. Untuk itu diperlukan penataan dan pengawasan yang lebih optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungan.
5. Diperlukan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif bagi daerah yang mengalami bencana alam, serta lebih mewaspadaı terjadinya bencana bagi daerah yang tergolong rawan bencana.